DAULAT-RAKYAT VERSUS DAULAT-PASAR

Sri-Edi Swasono

Globalisasi, sebagai sempalan doktrin globalisme yang mulia, ternyata merupakan paham liberalisme baru untuk menjadi topeng bagi pasar-bebas, yang justru mengabaikan cita-cita globalisme ramah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan mondial. Namun mungkin mulai ada semacam ada titik-balik, berkat adanya kesadaran baru, bahwa tahun lalu PBB mulai menggariskan “Delapan Tujuan Milenium” (Eight Millennium Development Goals/MDGs) yang mulai kurang menaruh kepercayaan pada mekanisme pasar-bebas. Implisit tersirat bahwa intervensi dan perencanaan oleh negara untuk mencapai delapan MDGs itu mulai diperlukan.

Bagaimanapun juga opini telah sempat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain melalui media massa, kurikulum dan silabus. Pesan opini itu adalah agar kita ramah terhadap pasar. Tatkala tempo hari sedang rame-ramenya masyarakat menggambarkan kabinet yang ideal, media massa dan para penulis artikel di koran nimbrung, mereka bilang, “kabinet yang kita perlukan adalah kabinet yang ramah-pasar”. Lalu digarap lebih lanjut, bahwa presiden pun perlu diyakinkan bahwa ia harus ramah-pasar. Mulailah penyesatan ide ini membawa akibat kecelakaan besar. Mengapa bukan pasar yang harus ramah kepada presiden, kepada rakyat atau kepada kepentingan nasional?


Pasar yang dikehendaki oleh


Memang pasar-bebas global bisa mendorong efisiensi ekonomi global, tetapi mengapa Selatan harus membayar lebih banyak dan berkorban lebih banyak bagi efisiensi Utara.

Adam Smith membawakan "puisi" indah dalam pembukaan bukunya The Theory of Moral Sen-
timents, “...sebagai manapun ego-
itsnya manusia dapat diperkirakan,
ternyata pada sifat dasarnya ada
prinsip-prinsip, yang membuat ia
senang atas terjadinya keberun-
tungan pada orang-orang lain, dan
memberikan rasa bahagia yang
diperlukan oleh mereka, meskipun
ia tidak memperoleh apa-apa dari
itu, kecuali melihat hal yang baik
itu terjadi...”.

Namun kemudian dalam
bukunya The Wealth of Nations ia
mengatakan yang sedikit berbe-
da “... setiap orang menghindaki
keuntungan bagi dirinya sendiri,
dalam banyak hal dibimbing oleh
suatu tangan tak kelihatan (an in-
visible hand) untuk mempromosi
suatu tujuan yang bukan bagian
dari kehendaknya sendiri. Dengan
mengejar pamrih pribadinya sendiri
(his own self interest) ia acapkali
mempromosi kehendak masyarakat
dengan lebih berhasil ...”. Dalam
buku Smith yang sangat tebal ini
perkataan “invisible hand” hanya
satu kali saja dikemukakan. Para
ahli ekonomi pasar mengeks-
plotisasi perkataan ini secara ber-
lebih-lebihan. Terhadap domi-
nannya self-interest dalam filsafat
ekonomi Smith ini, ahli sosiologi
terkemuka Amitai Etzioni semp-
pat mengatakannya sebagai “das
Smith Problem” atau “persoalan
Smith” (Etzioni, 1988), dengan
daya lain Smith tidak konsisten.

Terlepas dari inconsistency dua
bukunya itu, bila saja Adam
Smith masih hidup ia boleh ka-
get melihat invisible hand-nya itu
telah berubah ganas menjadi the
dirty hand atau the dark hand
mengatakan bahwa Smith’s in-
visible hand turns out to be all
thumbs, artinya serba kikuk dan
canggung.

Persaingan bebas yang sem-
purna memang tidak pernah ada, sehingga pasar-bebas pun
tidak akan pernah ada. Yang
ada justru distorsi-distorsi pasar
dilakukan demi kepentingan-ke-
pentingan ekonomi dan politik,
disertai insting-insting predatori
dan hegemonik baik yang bersi-
fat laten maupun yang poten,
penuh firqoh. Contoh-contoh
konkret seperti perpeangan
(dalam segala bentuknya), per-
ftarungan, clash of civilizations (se-
cara terbuka atau terselubung),
egosisme nasional dan lain-lain,
tidak memungkinkan adanya
persaingan yang bebas dan fair.
Nasionalisme, dengan keunikan
dan identitas spesifik-egoistik
yang dituntutnya, tidak mati,
bahkan Joan Robinson (1964)
menegaskan bahwa “…the very
nature of economics is rooted in na-
tionalism...”, dan Greenfeld
(2001) menyatakan “…national-
ism is not gone...the sustained
growth characteristic of modern
economy is not self-sustained, it is
stimulated and sustained by na-
tionalism...".

Pasar tidak seharusnya boleh bebas bagi negara-negara berkembang, sebagaimana negara-negara maju sendiri senantiasa melakukan proteksi dan memberikan berbagai subsidi pada perekonomian dalam-negerinya. Pertemuan Mauritius menuntut dihapuskannya ketidakadilan diskriminatif ini.

Apa pula makna pasar? Pasar adalah suatu mekanisme lelangan belaka, yang kuat (miliki dana) akan memenangkan lelang. Yang tidak memiliki kekuatan dana akan dikalahkan atau hanya aku menjadi penonton dan berada di luar pagar transaksi ekonomi. Smith mensitir Thomas Hobbes dalam kaitan ini, “...Wealth, as Mr. Hobbes says, is power”. Dari ekonomi kontemporer ingin saya melanjutkannya, “...money is the most liquid wealth, and money, is power!” (di sinilah para “penyandang” BLBI menjadi “penguasa pasar”).

Pasar tidak omniscient dan tidak omnipotent, penuh kemahalan dan kesalahan, tidak self-correcting dan tidak self-regulating, maka the invisible hand menjadi nonsense: “...pasar adalah suatu instrumen yang tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang telah makmur ... pasar merupakan pelayan yang rajin bagi yang kaya, tetapi tak perduli pada yang miskin ... pasar mendorong perbuatan yang tidak bermoral, hal mana tidak hanya merupakan suatu kegagalan ekonomi tetapi juga merupakan suatu kegagalan moral ...”. (Heilbroner and Thurow, 1994).

Siapa itu pasar? Pasar adalah the global financial tycoons atau para taoke keuangan global dengan para fund managers mereka. Si miskin, acapkali sekedar penonton dan sekaligus sebagai obyek pasar, tetapi bukan pentu keputusan-keputusan pasar. Para taoke keuangan global ini membentukkan diri sebagai “a global governance” yang terstruktur dalam jaringan new international capitalist class sebagaimana digambarkan Petras dan Veltme-
yer (2001), yaitu para TNCs (transnational corporations) yang mencapai jumlah 37.000, Bank Dunia, IMF, para IFIs (international financial institutions), G-7, TC (Trilateral Commission Forum) dan seterusnya. Mereka yang pada dasarnya menguasai per- baiakan, investasi, perdagangan, produksi, distribusi dan stok barang serta jasa sekaligus.

Sejak awal persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, para founding fathers kita telah mewaspadai pola pikir Adam Smith sebagai sumber mindset kaum fundamentalis pasar, termasuk kelompoknya yang sedang dime karkan dan dinaikdaunkan di Indonesia.

Mohammad Hatta (1934 - 70 tahun yang lalu) menegaskan bahwa "... teori Adam Smith berdasar kepada perumpamaan homo economicus, yang hanya ada dalam dunia pikiran tidak ada dalam masyarakat yang lahiriah, satu golongan kecil yang aktif dan bermodal cukup, yang memutuskan segala soal ekonomi; dan satu golongan besar, orang banyak, yang pasif dan lambat, yang tiada mempunyai tenaga ekonomi, yang kedapannya terserah pada putusan golongan pertama, praktek laisse r-faire stelsel memperbesar mana yang kuat, menghancurkan yang lemah..."; ini mirip sekali dengan yang pada tahun 1980 dikatakan oleh Stigler (tokoh penerima penghargaan Nobel) 45 tahun kemudian sesudah Hatta. Sebelumnya, KRT Radjiman Wediodiningrat, (Ketua BPPUPKI) mengatakan "...Adam Smith adalah golongan cerdik pandai yang tidak menganggap pamriah pribadi (self-interest-nya Adam Smith, pen.) sebagai suatu penyakit masyarakat..." (Wediodiningrat, 1943). Para pendiri Republik kita berpaham kebersamaan dan kekeluargaan (ukhuwah), menolak pengutamaan kepentingan pribadi (self-interest dan liberalisme) yang penuh firqoh.

Sejak Indonesia merdeka, kita tidak pernah meninggalkan ekonomi pasar. Peran pasar dalam alokasi sumber-sumber ekonomi dan sebagai upaya mencapai efisiensi ekonomi tetap diperhatikan, meskipun kita tidak mendewakannya.

Marilah kita kembali menuntut janji ISEI dalam memberi makna terhadap “Demokrasi Ekonomi” Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) di akhir 1980-an, yang menegaskan bahwa “pasar haruslah terkendali” (bukan bebas). Untuk saat ini mungkin kita lebih tepat mengatakan bahwa bukan hanya pasar yang harus kita kendalikan, tetapi terutama adalah para fundamentalis pasarnya, yang tidak mau tahu bahwa ekonomi neoklasikal, yang hanya sekedar berdasar persaingan, adalah sempit dan
obsolit. Mereka tidak mau unlearn dan jauh ketinggalan dengan semangat pro-miskin PBB. Bahkan mereka terang-terangan antipopulis. Penulis mencatat Marzuki Usman (mantan Ketua Umum ISEI) mengatakan "...sekarang jaman pasar-bebas, this is no free lunch...". Padahal pada acara-acara taraweh ia percaya bahwa Rosulullah bersabda "...bukan ummatku yang ti-
dur kenyang tetapi membiarkan tetangganya kelaparan...".

Menerima pasar-bebas secara apa adanya berarti membenarkan "Daulat Pasar" menggusur "Daulat Rakyat", sekaligus membiarkan cita-cita "pembangunan Indonesia" berubah menjadi sekedar "pembangunan di Indonesia". Lalu kita menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.